

KONSTRUKSI PEMIKIRAN PROFESOR YUSNY SABY DALAM MENGATASI RADIKALISME DAN EKSTREMISME

Syamsul Bahri

Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh, Banda Aceh

syamsulbahri167@ymail.com

Sri Suyanta

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

srisuyanta@ar-raniry.ac.id

Abstract

This article discusses Prof. Yusny Saby's thoughts on strategies and practices in reducing radicalism and extremism. The research employs a qualitative approach with a descriptive exploratory method. Data were collected through in-depth interviews and observations. Data analysis techniques include grouping information, coding emerging themes, and developing descriptive narratives to comprehensively depict the informant's views and contributions. The findings indicate that Prof. Yusny's understanding encompasses several key aspects: 1) Religious Cosmology: Prof. Yusny emphasizes human responsibility as God's stewards on earth, with Pancasila as the microcosm of religious values. 2) Terrorism and Jihad: Terrorism contradicts Islamic teachings of rahmatan lil'alamin, and jihad should include sincere efforts like seeking knowledge and upholding justice, not merely physical warfare. 3) Musyawarah and Democracy: The concept of musyawarah in Islam aligns with democratic principles, and leaders should be chosen based on expertise and understanding. 4) Public Services and Law Enforcement: Addressing terrorism in Indonesia must focus on justice in public services and law enforcement to prevent dissatisfaction that triggers radicalism. 5) Humane Approach and Ulama Certification: A humane approach and guidance involving idol figures from extremist circles, as well as ulama certification, are necessary to ensure the correct delivery of religious teachings.

Keywords: conceptual framework, radicalization, extremization, Yusny Saby

Abstrak

Artikel ini membahas pemikiran Prof. Yusny Saby mengenai strategi dan praktik dalam mengurangi radikalisme dan ekstremisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Teknik analisis data mencakup pengelompokan informasi, pengkodean tema-tema yang muncul, dan pengembangan narasi deskriptif untuk menggambarkan pandangan dan kontribusi informan secara komprehensif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Prof. Yusny mencakup beberapa aspek kunci: 1) Kosmologi Beragama: Prof. Yusny menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi, dengan Pancasila sebagai mikrokosmos nilai-nilai keberagamaan; 2) Terorisme dan Jihad: Terorisme bertentangan dengan ajaran Islam rahmatan lil'alamin, dan jihad harus mencakup usaha tulus seperti mencari ilmu dan menegakkan keadilan, bukan hanya perang fisik. 3) Musyawarah dan Demokrasi: Konsep musyawarah dalam Islam sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan pemimpin sebaiknya dipilih berdasarkan keahlian dan pemahaman. 4) Pelayanan Publik dan Penegakan Hukum: Penanganan terorisme di Indonesia harus fokus pada keadilan dalam pelayanan publik dan penegakan hukum untuk mencegah ketidakpuasan yang memicu radikalisme. 5) Pendekatan Manusiawi dan Sertifikasi Ulama: Pendekatan manusiawi dan bimbingan yang melibatkan tokoh idola dari kalangan ekstremis, serta sertifikasi ulama, diperlukan untuk memastikan ajaran agama disampaikan dengan benar.

Kata Kunci: konstruksi pemikiran, radikalisme, ekstremisme, Yusny Saby

A. Pendahuluan

Persoalan terorisme di Indonesia masih menjadi ancaman serius dan belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Sejak peristiwa bom Bali I tahun 2002, Polri telah menangkap banyak pelaku terorisme. Namun, keberhasilan ini belum mampu mengakhiri gerakan terorisme di Indonesia. Sebagai contoh, aksi teror dan bom bunuh diri terjadi di Surabaya, yaitu Gereja Santa Maria Tak Bercela, bom di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, dan Gereja Kristen Indonesia. Pada hari yang sama bom juga meledak di Rusunawa Wonocolo Sidoarjo. Pada tanggal 14 Mei 2018, bom bunuh diri terjadi di Markas Polrestabes Surabaya.¹ Pada rentang waktu tersebut, hampir setiap kantor kepolisian di Indonesia melakukan kesiagaan dan kewaspadaan, seperti terlihat di komplek perkantoran Kapolda Aceh pada saat itu.² Data terbaru menunjukkan bahwa delapan terduga teroris dari kelompok Jemaah Islamiyah (JI) ditangkap oleh Detasemen Khusus 88 di Sulawesi Tengah pada April 2023.³ Mereka tidak hanya diduga sebagai pengurus kelompok tersebut, tetapi juga aktif mengikuti pelatihan paramiliter. Di Kabupaten Karawang, polisi mengamankan bahan peledak di rumah kontrakan terduga teroris yang juga berdagang bubur sumsum keliling. Seorang terduga teroris di Karawang yang terafiliasi dengan ISIS juga ditangkap oleh Densus 88.⁴

Pada sisi lain, meskipun upaya deradikalisasi telah dilakukan, tidak semua mantan teroris berhasil diubah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa beberapa individu yang telah menjalani program deradikalisasi tetap kembali ke ideologi ekstremis.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam menangani terorisme tidak hanya terletak pada penangkapan pelaku, tetapi juga pada efektivitas program deradikalisasi untuk memastikan perubahan yang berkelanjutan dalam keyakinan dan perilaku para mantan teroris.

¹ DetikNews. <https://news.detik.com/berita/4024374/rentetan-teror-dari-surabaya-sampai-riau> diakses pada tanggal 23 Juni 2024

² "Kesiapsiagaan itu ditandai dengan ditingkatkannya kewaspadaan termasuk penambahan kekuatan polisi di markas-markas komando polisi. Sedangkan TNI, jajaran Kodam IM mulai memerintahkan para intelijen untuk memonitor situasi dan perkembangan keamanan di Aceh dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian." <http://aceh.tribunnews.com/2018/05/17/polda-dan-kodam-siaga> diakses 23 Juni 2024

³BBC News Indonesia. (2023, April 18). Delapan orang terduga teroris dari kelompok Jemaah Islamiyah (JI) ditangkap oleh Detasemen Khusus 88 di Sulawesi Tengah. BBC News Indonesia. diakses via <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgyd29j2j0o>

⁴ DetikNews. (2023, April 18). Terduga Teroris yang Ditangkap di Karawang Terafiliasi Pendukung ISIS. DetikNews. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-7393018/terduga-teroris-yang-ditangkap-di-karawang-terafiliasi-pendukung-isis>

⁵ DetikNews. (2023, April 18). BNPT: Terduga Teroris Karawang Sudah Dideradikalisasi tapi Belum Berubah. DetikNews. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-7411593/bnpt-terduga-teroris-karawang-sudah-dideradikalisasi-tapi-belum-berubah>

Melihat aksi teror bom seperti dijelaskan di atas membuktikan bahwa seorang akan menjadi pelaku teror berasal dari berbagai kalangan. Artinya teroris itu bukan saja berasal dari golongan orang miskin, bukan dari kalangan orang tidak terdidik, bahkan seorang terdidik dan orang-orang yang hidupnya sudah mapan dan kaya, akan menjadi seorang teroris. Hal ini pernah disampaikan oleh BNPT (2016) bahwa “Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat.⁶ Mengapa seseorang menjadi teroris? Tentu tidak bisa dijawab secara serampangan berdasarkan subjektifitas kita sendiri. Misalnya kita menjawab, seseorang menjadi teroris dikarenakan pemahaman yang salah atas agama mereka—*karena aspek agama yang sering disorot*—mereka memahami jihad secara salah! Jawaban ini tentu ada benarnya, dan bukan pula satu-satunya kebenaran. Memahami terorisme secara sepahak, misalnya dari agama pelaku teror, akan menyebabkan kehilangan inti dari persoalan seseorang menjadi teroris. Terorisme bisa saja disebabkan dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, politik, ekonomi dan keagamaan. Meskipun aksi teror disebabkan dari berbagai aspek, cara penanggulangannya dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Hikam mencatat setidaknya diperlukan 3 pendekatan dalam mensukseskan program deradikalasi, yaitu pendekatan humanis, pendekatan komunikasi sosial, pendekatan partisipatif dari elemen masyarakat.⁷

Setara Institute dalam temuan penelitiannya menyebutkan bahwa intoleransi adalah titik awal dari terorisme. Oleh karena itu, kerja-kerja deradikalasi tidak cukup hanya diarahkan terhadap mereka yang sudah menjadi teroris, tetapi juga terhadap kelompok-kelompok radikal, kelompok intoleran, dan masyarakat luas agar tidak terpengaruh oleh pandangan-pandangan radikal dan bertransformasi menjadi teroris. Program deradikalasi harus fokus pada tiga kelompok utama. Pertama, masyarakat umum, untuk mencegah mereka terpengaruh atau ikut dalam aksi-aksi radikal dan intoleran. Kedua, kelompok-kelompok radikal, dengan pendekatan counter-narrative untuk mengoreksi pemahaman yang salah tentang doktrin jihad dan mati syahid. Ketiga, kelompok jihadis atau teroris, untuk memutus hubungan mereka dengan kelompoknya (disengagement) sehingga tidak kembali melakukan aksi kekerasan.⁸ Melihat fokus deradikalasi Setara Institut tersebut, menunjukkan bahwa siapa saja bisa menjadi teroris. Bahkan kelompok-kelompok teroris selalu

⁶ Dikutip dari BNP Terorisme-Jakarta: Belmawa, 2016 belmawa.ristekdikti.go.id diakses pada Februari 2018

⁷ Muhammad A.S Hikam, (2016), *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme Jakarta: Kompas*. hlm. 163

⁸ Ismail Hasani (Ed), *Dari Radikalisme Menuju Terorisme, Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta*, (Jakarta: Setara Institut, 2012), hlm. 195-200

berkembang dari pelaku teror (dalam lingkup kecil-intoleran) yaitu masyarakat umum, menjadi kelompok *jihadis*. Dengan justifikasi ini seseorang bisa saja bertindak intoleran ketika berhadapan dengan masyarakat yang berbeda pemahaman agama dengannya, sehingga tidak tertutup kemungkinan narasi kebenaran yang dibangun oleh seseorang bertentangan dengan anggapan umum seperti istilah demokrasi, negara Islam, jihad, dan lain sebagainya.

Ada berbagai artikel hasil penelitian yang membahas tentang upaya radikalisasi sebagai penanganan kasus-kasus terorisme. Zulfikar dan Aminah (2020) mengkaji peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, dengan fokus pada program deradikalisasi dan pencegahan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BNPT memainkan peran sentral dalam mengoordinasikan berbagai upaya, termasuk edukasi, rehabilitasi, dan reintegrasi narapidana terorisme. Efektivitas program ini sangat bergantung pada kerjasama lintas sektor dan pendekatan holistik yang melibatkan komunitas, pendidikan, serta penegakan hukum yang adil. BNPT berfungsi sebagai penggerak utama dalam memastikan bahwa seluruh proses deradikalisasi berjalan lancar dan mencapai sasaran yang diinginkan.⁹ Pradnyana (2022) mengeksplorasi perbedaan paradigma penanggulangan terorisme oleh negara-negara anggota ASEAN. Studi ini menjelaskan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menghadapi ancaman terorisme, tergantung pada konteks nasional mereka masing-masing. Ada kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan kontra-terorisme di tingkat regional untuk meningkatkan efektivitas dan koordinasi. Perbedaan dalam pendekatan ini mencerminkan kebutuhan untuk menghargai keragaman budaya dan politik di ASEAN sambil tetap berupaya menciptakan strategi regional yang terpadu dan efektif.¹⁰ Rehabilitasi dan deradikalisasi narapidana terorisme bertujuan mengurangi kemungkinan mereka kembali ke jaringan teroris setelah dibebaskan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk mencegah terulangnya tindakan terorisme dengan memberikan kesempatan bagi mantan teroris untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.¹¹

Kusuma dkk. (2019) membahas ancaman terorisme dari perspektif dimensi imaterial, termasuk faktor psikologis dan ideologis. Menurutnya radikalisasi sering kali berakar pada masalah psikologis dan sosial, serta pengaruh ideologi ekstremis.

⁹ Zulfikar, M., & Aminah, A. (2020). PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 129–144. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>

¹⁰ Pradnyana, H. (2022). Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2(1), 11–26. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.11-26>

¹¹ Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, 7(2), 141–156. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.29>

Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi akar masalah yang mendorong individu menuju radikalasi, dengan memberikan dukungan psikologis dan pendidikan yang komprehensif.¹² Selain itu strategi deradikalasi harus mencakup pengawasan media dan upaya untuk menyebarkan narasi kontra-ekstremis. Dengan memanfaatkan media sebagai alat untuk menyebarkan pesan damai dan kontra-narasi, diharapkan dapat mengurangi daya tarik ideologi ekstremis dan mengurangi radikalasi.¹³ Dan tentu saja, definisi dan kualifikasi terorisme yang jelas dalam hukum penting untuk memastikan tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang efektif. Kejelasan dalam definisi hukum ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa tindakan yang diambil dalam memerangi terorisme adalah tepat sasaran dan proporsional.¹⁴

Artikel-artikel penelitian di atas dapat dipahami bahwa penanganan terorisme melalui deradikalasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, yang melibatkan berbagai sektor dan strategi. Pendekatan yang berbasis pada pendidikan, rehabilitasi, serta pemahaman psikologis dan sosial sangat penting untuk keberhasilan program deradikalasi dan pencegahan terorisme di Indonesia. Seorang emeritus UIN Ar-Raniry, Prof. Yusny Saby, mengatakan bahwa seseorang menjadi teroris disebabkan karena mereka tidak senang dengan lingkungan tempat tinggal mereka, terutama atas segala kebijakan pemerintah terkait hal ihwal kemasyarakatan. Segala kebijakan pemerintah yang tidak benar, yang dilakukan oleh oknum-oknum dari aparatur pemerintahan, akan menyebabkan orang melakukan aksi-aksi radikal dan intoleran. Hal ini sangat penting dicamkan oleh pemangku kebijakan negeri ini. Poin penting disampaikan yaitu kondisi sosial, ekonomi, yang melibatkan kebijakan pemerintah turut memberi andil pada tindakan radikalisme jika tidak dikelola dengan baik.

Penelitian tentang pemikiran Prof. Yusny Saby terkait penanganan terorisme masih terbatas. Salah satu artikel yang membahas pandangan beliau adalah karya Rini Marlina dkk. (2021), yang mengulas pandangan tokoh agama di Banda Aceh, termasuk Prof. Yusny. Temuan mereka menunjukkan bahwa tokoh agama di Banda Aceh menolak gerakan radikalisme karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan negara. Radikalisme dianggap merugikan orang lain dan merusak hubungan kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara. Prof. Yusny menegaskan

¹² Kusuma, A. et.all. (2019). Indonesia dan Ancaman Terorisme: Dalam Analisis Dimensi Imaterial. *Sosiohumaniora*, 21(3).<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v2i13.21142>

¹³ Sukoco, A., MEDIA, GLOBALISASI DAN ANCAMAN TERORISME. (2021). *Journal of Terrorism Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.7454/jts.v3i2.1039>

¹⁴ B ardi, A. (2023). Pengaturan Kualifikasi Terorisme Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain. *JATISWARA*, 38(1). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.484>

bahwa gerakan radikal yang mengganggu, menakutkan, dan mengancam masyarakat serta merusak fasilitas umum dimulai dari penyebaran hoaks dan sikap permusuhan. Alur ini dimulai dari pemahaman yang keliru, penyebaran melalui media sosial, dan berakhir pada ancaman terhadap masyarakat.¹⁵ Selain itu, dalam buku Kamaruzzaman (2016), Prof. Yusny menjelaskan dalam sebuah prolog bagaimana jihad yang dimaknai secara salah dapat menjadi ancaman terorisme. Pandangan beliau menekankan pentingnya memahami jihad dan ajaran agama dengan benar untuk mencegah radikalisme dan ekstremisme.¹⁶

Prof. Yusny, yang juga pernah menjabat ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh, pada kesempatan wawancara dengan penulis menyampaikan bahwa agama Islam pada hakikatnya adalah agama yang anti terhadap terorisme. Namun ketika aksi teroris dilakukan dalam berbagai wajah, dan membawa simbol agama, inilah yang dipletisir oleh orang-orang yang *jahil* terhadap agama. Namun aspek agama tidak akan menjadi alasan seseorang menjadi teroris, meskipun agama tersebut dipahami secara salah. Dengan kata lain radikalisme hingga terorisme sering melibatkan ketidakpuasan seseorang atau sekelompok orang terhadap kebijakan pemerintah, yang bisa jadi dinilai tidak adil. Akan tetapi karena ketidakpuasan sebagian kalanganlah yang membuat seseorang berbuat teror.

Penelitian tentang Prof. Yusny Saby (selanjutnya ditulis Prof. Yusny) sangat penting karena beliau merupakan tokoh yang memiliki pemikiran mendalam dan berpengaruh dalam konteks deradikalisasi dan de-ekstrimisasi di Indonesia, khususnya Aceh. Disebut berpengaruh, karena beliau pernah menjabat rektor, ketua BRA (2006-2007), ketua FKPT Aceh (2012-2017), menjadi pemateri di berbagai seminar dan konferensi, hingga figurnya menjadi patron yang diundang menjadi pemateri berkaitan dengan isu-isu terorisme dan kajian keislaman kontemporer.¹⁷ Pemikirannya menawarkan pandangan yang unik dan komprehensif tentang bagaimana ajaran agama dapat diterapkan untuk mengatasi radikalisme dan ekstremisme.

Prof. Yusny memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan menangani tantangan radikalisme di masyarakat. Pemikiran beliau juga sangat relevan dalam konteks kebijakan publik dan pendidikan. Ia menekankan pentingnya sertifikasi ulama dan pendekatan manusiawi dalam program deradikalisasi, yang tidak hanya menyasar perubahan perilaku individu tetapi juga memperkuat

¹⁵ Marlina, R., dkk. (2021). Paham Radikal dalam Pandangan Tokoh Agama di Banda Aceh. *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2021, 190-207. <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/jpi>

¹⁶ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad. *Memahami Potensi Radikalisme & Terorisme di Aceh*. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2016).

¹⁷ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, et.al, *Yusny Saby Sang Motivator, Menelusuri Karakter Pemimpin Jujur dan Ikhlas dalam Membangun Umat*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016)

komunitas melalui pendidikan berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Pemahaman Prof. Yusny tentang konsep musyawarah dalam Islam memberikan perspektif penting tentang integrasi demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya kontra-terorisme. Oleh karena itu, penelitian tentang Prof. Yusny mengungkap berbagai strategi dan praktik dalam mengurangi radikalisme dan ekstremisme. Pemikiran beliau diharapkan dapat menjadi konsepsi etika beragama di negara yang multikultural, serta menawarkan panduan dalam menangkal pemahaman radikal dan bagaimana seharusnya menjadi warga negara yang baik di tengah keberagaman.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksploratif, yang bertujuan untuk menggali pandangan mendalam Prof. Yusny mengenai isu-isu kontemporer seperti terorisme, ekstrimisme, deradikalisasi, jihad, dan demokrasi dalam Islam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam langsung dengan informan, dan observasi terhadap kiprah beliau selama ini. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi yang diperoleh, melakukan coding terhadap tema-tema yang muncul, serta menyusun narasi deskriptif untuk menggambarkan pandangan dan kontribusi Prof. Yusny secara komprehensif.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Prof. Yusny adalah seorang akademisi dan tokoh terkemuka dalam studi Islam di Indonesia, khususnya di Aceh. Beliau telah mengabdikan dirinya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, yang sebelumnya dikenal sebagai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry. Di kampus ini, Prof. Yusny dikenal sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam membentuk pemahaman dan kajian keislaman yang moderat dan inklusif. Selain mengajar, beliau aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, serta sering menjadi pembicara dalam seminar dan konferensi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional. Kiprah beliau semakin meluas saat menjabat sebagai Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh, di mana beliau berperan penting dalam merumuskan strategi dan kebijakan pencegahan terorisme di Aceh.

Selain itu, amatan peneliti selama ini, Prof. Yusny sering diundang sebagai narasumber dalam berbagai seminar dan konferensi yang membahas isu-isu kontemporer seperti terorisme, radikalisme, jihad, dan demokrasi dalam Islam. Hal ini menjadikan dirinya sebagai figur yang dipercayakan dan terdepan dalam upaya

membangun pemahaman yang benar dan komprehensif tentang kajian Islam di Indonesia. Data ini juga penulis adaptasi dari buku biografi beliau.¹⁸ Berkaitan dengan istilah radikalisme, Menurut Prof. Yusny, istilah radikal bukan saja berorientasi pada praktik kekerasan dalam suatu ajaran, namun ketika kekhawatiran utama saat ini adalah adanya ucapan, perbuatan, dan tindakan yang bisa memicu kemarahan dan sentimen negatif antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat. Tindakan-tindakan ini dapat menyebabkan pertentangan yang lebih besar dan lebih serius, yang kemudian disebut ekstrimisme. Oleh karena itu, dalam konteks ini, tindakan yang memicu konflik seperti itu dapat dianggap sebagai radikal. Ia mengatakan,

"istilah atau definisi (radikal) yang jelas belum ada. Yang dikhawatirkan sekarang adalah adanya ucapan, perbuatan, dan tindakan yang dapat memicu kemarahan dan sentimen antar pribadi dan masyarakat, yang kemudian berdampak pada terjadinya pertentangan yang lebih besar. Itu dapat kita katakan sebagai radikal bahkan ekstrim. Karena pada hakikatnya, radikal itu masih ada positifnya. Berpikir radikal, orang yang belajar radikal, radikalnya tidak mau telat masuk kelas, itu radikal. Dosen radikal selalu masuk pada waktunya dan keluar pada waktunya. Ini masalah sebutannya."

Di sini, Prof. Yusny juga menekankan bahwa konsep radikal tidak sepenuhnya negatif. Dia menjelaskan bahwa ada sisi positif dari berpikir dan bertindak radikal. Sebagai contoh, seseorang yang berpikir radikal dalam belajar akan selalu berusaha untuk tidak terlambat masuk kelas. Demikian juga, seorang dosen yang radikal dalam artian positif selalu masuk kelas tepat waktu dan menyelesaikan tugasnya dengan disiplin. Dalam pengertian ini, radikal berarti menjalankan sesuatu dengan penuh kesungguhan dan komitmen.

Masalah utama adalah pada sebutan dan persepsi tentang radikal. Sementara tindakan radikal dapat memiliki konotasi negatif ketika memicu konflik dan pertentangan, ada juga aspek positif dari ketekunan dan disiplin yang bisa digolongkan sebagai radikal. Pemahaman ini penting untuk membedakan antara tindakan radikal yang merusak dan tindakan radikal yang membangun.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Prof. Yusny, berikut adalah enam temuan besar yang mencakup pandangannya terkait kosmologi agama, terorisme, jihad, demokrasi dalam Islam, penanganan terorisme di Indonesia, dan pendekatan untuk mengatasi ekstremisme dan radikalisme:

1. Kosmologi Beragama

Kosmologi beragama menguraikan bagaimana Tuhan berinteraksi dengan manusia dan apa yang diharapkan dari manusia dalam hubungan ini. Dalam Islam,

¹⁸ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, et.al, *Yusny Saby Sang Motivator*, ..

hubungan ini diwujudkan melalui konsep *tauhid* (keesaan Tuhan) dan peran manusia sebagai *khalifah* (pengelola) di bumi. Prof. Yusny menjelaskan konsep makrokosmos dan mikrokosmos dalam konteks keberagamaan dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Menurutnya, manusia adalah ciptaan Tuhan, "*ini disebut juga bahwa manusia sebenarnya ' diciptakan dalam citra Tuhan' ('created in the image of God')*" dan kekuasaan yang dimiliki oleh manusia adalah representasi dari kekuasaan Tuhan. Ketika seseorang menjadi penguasa, segala tindakan dan keputusan yang diambil harus dilakukan atas nama Tuhan, baik itu memberikan hukuman maupun memberikan bonus. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak bisa diperlakukan sembarangan karena ada tanggung jawab besar di baliknya. Ia menjelaskan;

"Manusia ini diciptakan oleh Tuhan, kekuasaan kita adalah kekuasaan Tuhan. Misalnya saya ini penguasa, saya hukum atas nama Tuhan, saya kasih bonus atas nama Tuhan, maka tidak bisa main-main. Pancasila adalah mikrokosmosnya orang-orang beragama di Indonesia, dalam artian manusia Indonesia ini bertuhanlah menurut kemampuannya, menurut keimannanya, dengan cara manusia itu harus punya rasa kemanusiaan yang besar. Karena apa? Karena manusia ini ciptaan Tuhan. Apapun ideologi Anda, apapun agama Anda, Anda tersambung dengan saya dalam satu sistem makrokosmos. Inilah persoalan. Misalnya saya penguasa, seolah-olah mewakili Tuhan juga kan, supaya tidak menjadi asing antar manusia, pemimpin, dan ide terhadap Tuhan. Dan itu tidak terjangkau, tetapi komunikasi rakyat dengan pemimpinnya adalah mikrokosmos daripada satu sistem keberagamaan manusia. Kita harus ada titik tumpu, titik sentuh, ada alamat yang jelas, tidak mungkin tidak ada alamat di Indonesia. Makanya mikrokosmos itu jelas, tidak masuk Yahudi ke mikro kita, Kristen beda, mikro Arab mikro Aceh beda."

Pancasila, menurut Prof. Yusny, adalah mikrokosmos dari orang-orang beragama di Indonesia. Artinya, Pancasila telah mencerminkan prinsip-prinsip keberagamaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang bertuhan sesuai dengan kemampuan dan keimanan masing-masing. Dalam menjalani kehidupan beragama, manusia Indonesia harus memiliki rasa kemanusiaan yang besar, karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Hal ini menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik keberagamaan di Indonesia.

Lebih jauh, Prof. Yusny menjelaskan bahwa apapun ideologi atau agama yang dianut seseorang, semuanya terhubung dalam satu sistem makrokosmos. Sistem makrokosmos ini mencakup keseluruhan keberagamaan dan kehidupan sosial manusia. Sebagai penguasa, seseorang harus bertindak seolah-olah mewakili Tuhan, sehingga hubungan antara pemimpin dan rakyatnya tidak menjadi asing. Komunikasi antara rakyat dan pemimpinnya adalah bagian dari mikrokosmos dalam sistem keberagamaan yang lebih besar. Dalam konteks ini, mikrokosmos mengacu pada hubungan dan komunikasi yang lebih kecil namun penting antara individu dan

pemimpinnya, sedangkan makrokosmos mencakup keseluruhan sistem keberagamaan dan sosial yang lebih luas. Prof. Yusny menekankan pentingnya adanya titik tumpu dan titik sentuh yang jelas dalam hubungan ini, yang memastikan bahwa tidak ada yang merasa terasing dalam sistem tersebut. Selain itu, beliau menekankan bahwa setiap komunitas atau kelompok memiliki mikrokosmosnya sendiri, seperti mikro Yahudi, mikro Kristen, mikro Arab, dan mikro Aceh, yang berbeda satu sama lain namun tetap bagian dari makrokosmos yang lebih besar.

Prof. Yusny menjelaskan bahwa apapun ideologi atau agama yang dianut seseorang, semuanya terhubung dalam satu sistem makrokosmos. pandangan Prof. Yusny memperkuat bagaimana kosmologi beragama memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan beragama, serta membentuk interaksi sosial yang harmonis di Indonesia. Dalam skala mikro namun sering menjadi perdebatan publik, Prof Yusny memberikan beberapa contoh kasus:

"Masa dulu orang yang pakai jilbab tutup muka itu (adalah bagi kalangan) ningrat, keraton, cantik-cantik. Pada masa nabi Muhammad tutup muka itu (juga untuk) orang elit. Hal ini untuk membedakan dengan orang budak, kalan (pakaian) budak dada nampak, itu tidak masalah. Mereka "tidak ada harga". Makanya waktu shalat wajib tutup, yang ningrat bukan ningrat sama saja, oleh karena itu persoalan jilbab adalah persoalan mikro. Kalau ke Arab Saudi, silakan cadar, disana kalan tidak tutup muka dianggap tidak terhormat. Menutup muka itu aristokrasi, di Inggris Lady Diana tutup muka juga. Jangan dikatakan ini ajaran agama."

Dari cuplikan wawancara di atas, menurut Prof. Yusny, dalam konteks saat ini, penggunaan jilbab atau cadar adalah persoalan mikro, yaitu persoalan kecil yang berbeda tergantung budaya dan tempat. Selain itu ia mengomentari persoalan perempuan yang duduk *ngangkang*, yang mana di Aceh pernah menjadi perdebatan atau sering diperdebatkan dalam konteks agama. Ia menyebutkan bahwa di masa lalu, orang-orang duduk di atas keledai atau kuda dengan cara yang sekarang mungkin dianggap tidak sesuai syariat oleh sebagian orang. Namun, dia menekankan bahwa jangan sampai terjebak dalam perdebatan kecil mengenai syariat yang tidak esensial. Fokus harus diberikan pada aspek-aspek yang lebih penting dari ajaran agama.

"Rahmatan lil'alamin, itulah makronya. Wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin, bagaimana kita membangun makro itu? Sketsanya begini. Ini ajaran Islam: ada sekelompok Islam menerjemahkan Islam dalam persoalan beragama lihat kepada persoalan yang lebih besar. Mikro kita untuk memahami kebutuhan makro. Kita yang paham sedikit ini tetapi berkontribusi kepada yang rahmatan lil'alamin. Persoalan khilafiyah fikih adalah persoalan mikro tetapi dalam makro rahmatan lil'alamin. Yang anti Islam itu yang harus kita urus, bukan yang dari kita, karena kita menganggap orang tidak lengkap Islam, banyak bid'ah

dikerjakan. Kalau orang suka mengatakan orang lain ahlul bidah, itulah kepicikan dalam beragama, dan itu merugikan makro Islam yang rahmatan lil'alamin. Orang yang tidak memahami makro, tidak dapat memahami apa tujuan dari syariat itu sendiri. Dia pikir Islam itu simbol-simbol dan aksesoris."

Berdasarkan data di atas, Prof Yusny menggarisbawahi pentingnya memahami Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Paradigma *Rahmatan lil'alamin* adalah makrokosmos, atau pandangan besar yang mencakup keseluruhan prinsip Islam yang membawa kedamaian dan kebaikan universal. Ia mengkritik mereka yang terjebak dalam persoalan kecil atau mikro, seperti khilafiyah fikih (perbedaan pendapat dalam hukum Islam) dan menganggapnya sebagai esensi agama. Fokus utama harus pada kontribusi untuk kesejahteraan dan kemanusiaan yang lebih luas. Menganggap orang lain sebagai ahlul bidah (pelaku bidah) hanya akan merugikan tujuan besar Islam itu sendiri. Orang yang tidak memahami makro hanya melihat Islam sebagai kumpulan simbol dan aksesoris, bukan sebagai panduan hidup yang membawa rahmat bagi semua.

2. Terorisme Bukan Ajaran Islam

Deradikalisasi dapat dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengubah pandangan atau keyakinan seseorang yang telah teradikalisasi, mengurangi atau menghilangkan kecenderungan mereka terhadap tindakan kekerasan ekstrem. Atau dengan kata lain, de-ekstrimisasi adalah proses yang lebih luas dan bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan pengaruh ideologi ekstrem dalam suatu kelompok atau komunitas. Dua istilah inilah yang kemudian memunculkan istilah terorisme.

Prof. Yusny menegaskan bahwa tindakan terorisme yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam adalah kesalahan besar. Menurutnya, ajaran Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, penyiksaan, atau tindakan yang merugikan orang lain (ekstrimisme). Islam adalah agama yang membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

"Agama Islam itu agama yang selamat, sejahtera, dan rahmatan lil'alamin. Ketika ada oknum-oknum yang beragama Islam melakukan teror, ancaman, radikalisme, ekstrimisme, kemudian mengaitkan dirinya dengan agama, itu sudah salah. Itu bukan ajaran agama.."

Ajaran Islam menurut Prof. Yusny sama sekali tidak pernah mendukung tindakan kekerasan atau terorisme. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengatasnamakan Islam adalah sebuah kesalahan besar dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. "Apalagi itu ada istilah bom bunuh diri, bom pengantin, macam-macam itu, bukan ajaran Islam dan itu haram. Jadi itu bukan jihad, tetapi jahat." Prof. Yusny menjelaskan bahwa segala bentuk teror, termasuk bom bunuh diri dan bom pengantin—yang pernah terjadi di Indonesia—adalah tindakan yang

haram dalam Islam. Tindakan tersebut bukanlah bagian dari jihad, melainkan perbuatan jahat yang merusak citra Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin. Beliau menekankan bahwa umat Islam harus memahami bahwa kekerasan dan terorisme tidak memiliki tempat dalam ajaran agama ini.

Selain itu, Prof. Yusny juga menekankan pentingnya membedakan antara ajaran agama yang benar dengan tindakan oknum-oknum yang menyimpang. Pemahaman yang benar tentang Islam harus selalu disampaikan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh propaganda yang mengatasnamakan agama untuk melakukan tindakan terorisme.

3. Makna Jihad yang Sesungguhnya

Jihad dalam pandangan Prof. Yusny memiliki banyak bentuk dan tidak terbatas pada perang fisik. Jihad mencakup segala bentuk perjuangan yang dilakukan dengan tulus ikhlas untuk kebaikan, seperti menuntut ilmu, membela diri, dan memberikan nasihat kepada pemimpin yang keliru. Dengan mengutip ayat al-Qur'an surah at-Taubah ayat 41, ia menjelaskan;

"Wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabillallah, berjihadlah dengan harta dan jiwarimu di jalan Allah,..berjuanglah berjihadlah di jalan Allah itu dengan sepenuh jiwa raga dan harta benda... Berjihad itu bermacam-macam, menuntut ilmu itu jihad."

Menurut Prof. Yusny, menuntut ilmu, membela diri, dan memberikan nasihat yang benar kepada pemimpin yang keliru adalah bentuk-bentuk jihad yang sangat dihargai dalam Islam. Ia juga mengutip Al-Qur'an yang menekankan pentingnya berjihad di jalan Allah dengan sepenuh jiwa raga dan harta benda. Hal ini menunjukkan bahwa jihad adalah upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus untuk mencapai tujuan yang mulia. Dalam konteks modern, jihad dapat diartikan sebagai usaha yang gigih untuk meningkatkan kualitas hidup, menegakkan kebenaran, dan memperjuangkan keadilan. Apakah diperbolehkan menegur pemimpin jika dianggap salah? Menurut Prof. Yusny, *"Kalau rakyat berkaitan dengan pemimpin, memberi ingatan kepada pemimpin itu juga jihad, beri peringatan, ada pemimpinan yang sudah keliru, itu adalah jihad, bukan demo, bukan teror."* Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin dengan cara yang baik dan bijaksana. Akan tetapi tindakan teror dan kekerasan bukanlah cara yang tepat untuk melakukan jihad, melainkan hanya akan merusak tujuan mulia dari jihad itu sendiri.

"Berkaitan dengan pemimpin, inna min a'dzamil jibadi, kalimata 'adli 'inda sultanin jairin, 'jihad utama adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin.' Sampaikan kebenaran, itu adalah jihad. Banyak sekali bentuk jihad, tidak ada batasan untuk jihad. Jihad artinya bersungguh-sungguh melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk Allah, itu jihad. Ada saatnya kita berperang, tapi kapan perang itu terjadi, harus dipertimbangkan. Pada masa

penjajahan Belanda dan Jepang, jelas sekali kita berjihad melawan penjajahan, pendzaliman, dan penganiayaan. Namun, setelah masa itu, konteks jihad berubah."

Prof. Yusny menjelaskan bahwa jihad memiliki berbagai bentuk dan tidak terbatas hanya pada perang fisik. Menurutnya, jihad utama adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin. Jihad berarti bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk Allah. Jihad dapat juga disebut dengan perang, namun ada masa-masa tertentu. Misalnya pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, jihad dalam bentuk perang fisik jelas diperlukan untuk melawan penjajahan, pendzaliman, dan penganiayaan. Namun, dalam konteks saat ini, jihad dapat diwujudkan dalam berbagai upaya konstruktif lainnya yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan zaman.

4. Demokrasi dan Musyawarah dalam Islam

Prof. Yusny menjelaskan bahwa konsep musyawarah dalam Islam sejalan dengan prinsip demokrasi. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, adalah hasil dari musyawarah yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Meskipun istilah demokrasi tidak ada dalam Islam, namun prinsip musyawarah yang diusung dalam Al-Qur'an sangat relevan dengan praktik demokrasi di Indonesia. Pemilihan langsung, meskipun memiliki kekurangan, adalah hasil dari proses musyawarah yang bertujuan untuk kebaikan bersama. "*Pancasila itu hasil musyawarah atau bukan!, musyawarah! Pancasila itu hasil musyawarah... Wa syanirhum fil amri, bermusyawarahlah ketika ada urusan penting... Urusan kita ini diurus oleh DPR, MPR, itu bentuk musyawarah. Pemilihan langsung, meskipun banyak kekurangan, adalah hasil musyawarah kita.*" Musyawarah adalah salah satu prinsip penting dalam Islam yang diajarkan dalam Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan Prof. Yusny terdapat dalam surah Ali Imran ayat 159. Musyawarah sebagai konsepsi ilahi, sangat relevan dengan praktik demokrasi.

"Urusan kita ini diurus oleh DPR dan MPR, itulah bentuk musyawarah yang beragam. Misalnya, ada seribu orang petani dan sepuluh orang ahli pertanian. Jika kita ingin mengetahui cara menanam coklat yang baik, apakah kita bertanya kepada seribu petani atau kepada sepuluh ahli pertanian? Tentu kita bertanya kepada ahli pertanian. Nah, inilah yang terjadi pada pemilihan langsung, seperti pemilihan presiden dan gubernur. Sebenarnya, pemilihan langsung seperti ini tidak sehat, karena bisa saja seorang ulama besar dipilih bersamaan dengan seseorang yang buta huruf. Ini bisa dianggap melecehkan. Oleh karena itu, dulu ada istilah demokrasi terpimpin, silakan saja. Jangan salahkan, apakah kita sanggup menjelaskan kepada 260 juta rakyat Indonesia mengenai calon pemimpin? Tidak. Yang buta huruf, yang bodoh, yang miskin, memang begitu. Sebagian orang jangankan tahu pemimpin, nama keuchik di kampungnya sendiri saja tidak tahu, apalagi presiden."

Wawancara di atas memberikan informasi tentang praktik pemilihan pemimpin di Indonesia saat ini. Prof. Yusny menekankan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia diatur oleh DPR dan MPR, yang merupakan bentuk musyawarah yang kompleks dan beragam. Ia memberikan analogi tentang cara menanam coklat, di mana lebih bijak untuk bertanya kepada ahli pertanian daripada kepada seribu petani. Hal ini mengilustrasikan bahwa dalam konteks pemilihan pemimpin, kualitas dan keahlian harus diutamakan daripada jumlah suara. Menurutnya, pemilihan langsung seperti pemilihan presiden dan gubernur sebenarnya tidak sehat karena bisa saja seorang ulama besar dipilih bersamaan dengan seseorang yang buta huruf, yang bisa dianggap melecehkan. Menariknya Prof. Yusny mengomentari demokrasi terpimpin di Indonesia pada masa lalu, bahwa sistem demokrasi terpimpin sebelumnya dianggap lebih tepat karena memungkinkan pemilihan berdasarkan keahlian dan pemahaman, daripada hanya mengandalkan jumlah suara dari masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya memahami calon pemimpin mereka. Prof. Yusny menyatakan kekhawatirannya bahwa menjelaskan kompleksitas calon pemimpin kepada seluruh rakyat Indonesia yang beragam latar belakangnya adalah tugas yang hampir mustahil, mengingat banyak dari mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang politik atau kepemimpinan. Di sini, sepertinya Prof. Yusny ingin menyampaikan bahwa sistem pemilihan langsung di Indonesia kurang efektif karena tidak semua pemilih memiliki pengetahuan yang cukup tentang calon pemimpin, sehingga ia mengusulkan bahwa demokrasi terpimpin, yang lebih mengutamakan keahlian dan pemahaman daripada jumlah suara, bisa menjadi solusi yang lebih baik.

Selain itu, Prof. Yusny juga menekankan bahwa meskipun istilah penamaan demokrasi tidak ada dalam Islam, namun prinsip-prinsip musyawarah yang diusung dalam ajaran agama ini sangat mendukung konsep demokrasi. Peneliti mempertanyakan tentang sinkronisasi demokrasi ala Barat dengan praktik Islam;

"Apa yang di Barat itu apa? Bagaimana kita sepakat? Kita sepakat! Kita sudah mempelajari pemilihan khalifah dalam Islam: Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Muawiyah, dan Yazid. Ada enam khalifah, dan tidak ada satu pun proses pemilihannya yang sama. Contohkan Nabi ketika di Madinah membuat Piagam Madinah, dengan siapa dia buat Piagam Madinah? Ia membuatnya dengan Yahudi, apalagi dengan sesama kita. Dengan Yahudi saja boleh, yang penting sama-sama nyaman dan bagus. Piagam Madinah adalah konstitusi tertua di dunia yang tertulis, sangat pintar dan cerdas sekali, itulah yang disebut dengan Ukuhuwah Ittifaqiah."

Prof. Yusny menjelaskan bahwa proses pemilihan khalifah dalam Islam sangat bervariasi dan tidak ada satu pun yang sama. Khalifah pertama, Abu Bakar, dipilih melalui musyawarah di antara para sahabat Nabi Muhammad setelah wafatnya. Khalifah kedua, Umar bin Khattab, ditunjuk oleh Abu Bakar sebelum wafatnya.

Utsman bin Affan, khalifah ketiga, dipilih oleh sebuah dewan kecil yang dibentuk oleh Umar. Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, dipilih oleh sebagian besar penduduk Madinah setelah terbunuhnya Utsman. Muawiyah, khalifah kelima, memperoleh kekuasaannya setelah perang saudara, dan Yazid bin Muawiyah, khalifah keenam, diangkat melalui sistem pewarisan yang dimulai oleh ayahnya, Muawiyah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model pemilihan yang baku dalam sejarah Islam.

Lebih lanjut, Prof. Yusny membandingkan konsep musyawarah dalam Islam dengan demokrasi di Barat. Ia menekankan bahwa prinsip musyawarah telah lama ada dalam Islam, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah, yang dibuat dengan partisipasi komunitas Yahudi dan berbagai kelompok di Madinah, merupakan konstitusi tertua yang tertulis dan menunjukkan kecerdasan serta kebijaksanaan dalam menciptakan kesepakatan bersama. Prinsip ini disebut *Ukhuwah Ittifaqiah*, atau persaudaraan melalui kesepakatan, yang menekankan pentingnya kebersamaan dan kenyamanan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan.

5. Penanganan Terorisme di Indonesia

Terorisme muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap pelayanan publik dan ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam pemerintahan. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat menjadi pemicu munculnya radikalisme dan terorisme. Hal ini dikatakan oleh beliau sebagai satu bentuk penanganan ke depan,

"Terorisme muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap pelayanan publik dan ketidakadilan... Korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat menjadi pemicu munculnya radikalisme dan terorisme." Beliau menekankan bahwa untuk mengatasi masalah terorisme, diperlukan pemberantasan dalam pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil dan transparan. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil dan merata, serta menindak tegas oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, sentimen masyarakat pribadi kelompok kecil yang tidak mendapat kepuasan di dalam perlakuan republik ini karena ekonomi yang kurang imbang pernah menjadi korban dari pada perlakuan hukum. Dengan memahami dan merespon keluhan masyarakat secara tepat, menurut Prof. Yusny, pemerintah dapat mencegah munculnya rasa ketidakpuasan yang dapat berkembang menjadi radikalisme dan terorisme.

6. Pendekatan untuk Mengatasi Ekstremisme dan Radikalisme

Prof. Yusny menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan pembinaan dalam mengatasi ekstremisme dan radikalisme. Ia menyarankan untuk memahami latar belakang dan keluhan-keluhan dari individu-individu yang terlibat dalam ekstremisme. *"Pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan pembinaan... Memahami latar belakang dan keluhan-keluhan dari individu-individu yang terlibat dalam ekstremisme... Pendekatan yang melibatkan tokoh-tokoh idola mereka dapat membantu dalam mengurangi pengaruh negatif."*

Data di atas menggarisbawahi pentingnya melibatkan tokoh-tokoh idola dari kalangan individu-individu yang terlibat dalam ekstremisme. Tokoh-tokoh idola ini dapat membantu dalam mengurangi pengaruh negatif dan mengarahkan mereka ke jalan yang lebih konstruktif. Pendekatan yang melibatkan tokoh idola ini dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dan memudahkan proses pembinaan. Jika tidak dilakukan demikian, pembinaan akan sulit dilakukan, ia menuturkan, *"Maka terkadang disini kelemahan-kelemahan dalam hal berkaitan kebijakan-kebijakan pemerintah, disinilah telah memberi batere, artinya memberi energi kepada (orang-orang) yang anti-anti pemerintah, yang namanya radikal, bahkan teror"*. Berkenaan dengan hal tersebut, Prof. Yusny juga menyarankan perlunya sertifikasi ulama untuk memastikan bahwa ajaran agama disampaikan dengan benar dan tidak diselewengkan.

"Perlu sertifikasi ulama. Persoalan kita adalah ketika siapa saja bisa menjadi penceramah. Hal ini dikarenakan ketidaksiapan kita dalam mengajarkan agama. Mengajarkan agama yang benar diperlukan pemahaman yang benar terhadap materi, substansi, metode, dan siapa yang mengajarkannya. Itu tiga hal penting. Al-mudarris abammu minal tariqah (guru lebih penting dari metode), al-tariqah abamma minal maddah (metode lebih penting dari materi), maddah-tariqah-mudarris (materi-metode-guru), intinya adalah mudarris (guru). Ini paling penting. Mereka lah yang harus memahami agama yang benar. Jika guru suka membenarkan orang lain, maka murid juga ikut."

Prof. Yusny menekankan pentingnya sertifikasi ulama sebagai langkah untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang benar-benar memiliki pemahaman mendalam tentang agama yang dapat menjadi penceramah. Menurutnya, salah satu masalah utama yang dihadapi adalah bahwa siapa saja bisa menjadi penceramah tanpa adanya pengawasan yang memadai. Hal ini sering kali disebabkan oleh ketidaksiapan dalam mengajarkan agama secara benar. Untuk mengajarkan agama dengan benar, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap tiga hal penting: materi, substansi, dan metode pengajaran. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan siapa yang mengajarkan materi tersebut. Dia menekankan bahwa guru (*al-mudarris*) lebih penting daripada metode (*al-tariqah*), dan metode lebih penting daripada materi (*al-maddah*). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan kapabilitas guru adalah hal yang paling krusial dalam proses pengajaran agama.

Seorang guru yang baik harus memiliki pemahaman yang benar tentang agama dan mampu menyampaikan ajaran agama dengan cara yang benar dan bijaksana. Jika guru memiliki kecenderungan untuk membenarkan orang lain tanpa dasar yang kuat, maka murid-muridnya juga akan mengikuti jejak yang sama, yang bisa berujung pada penyebaran pemahaman yang keliru tentang agama. Dengan demikian, sertifikasi ulama diperlukan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang memadai yang dapat mengajarkan agama, sehingga pemahaman yang benar tentang agama dapat disebarluaskan dengan baik.

Pembahasan

Deradikalasi dan de-ekstrimisasi merupakan bagian penting dari strategi kontraterorisme. Menurut *Journal for Deradicalization*, program deradikalasi berfokus pada pemahaman kondisi mendasar yang memicu ekstremisme, seperti ketidakadilan ekonomi dan isolasi sosial. Program ini menggunakan re-edukasi agama, konseling psikologis, dan pendampingan untuk rehabilitasi. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan individual dan personalisasi program deradikalasi, seperti yang diusulkan oleh RAND Corporation, sangat penting mengingat setiap individu memiliki motivasi yang unik dalam terlibat dalam ekstremisme.¹⁹

European Commission menekankan bahwa tidak semua radikalasi berujung pada kekerasan. Memahami perbedaan antara pandangan ekstrem yang non-kekerasan dan ekstremisme kekerasan sangat penting untuk menentukan tindakan pencegahan yang tepat. Hal ini sejalan dengan strategi deradikalasi di negara-negara seperti Arab Saudi, yang menekankan perubahan ideologi dan reintegrasi sosial dengan program yang disesuaikan secara unik untuk setiap individu.²⁰ Evaluasi efektivitas program deradikalasi harus menggunakan metodologi yang ketat dan berbasis bukti. Efektivitas program juga bergantung pada kerjasama lintas sektor dan pendekatan holistik yang melibatkan komunitas, pendidikan, dan penegakan hukum yang adil.²¹ Di Indonesia, Pancasila berperan penting dalam upaya deradikalasi dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan yang dapat menepis ideologi radikal. Johan Febriansyah dalam "Portrait of Deradicalization in

¹⁹ Clutterbuck, L. (2015, June 10). *Deradicalization programs and counterterrorism: A perspective on the challenges and benefits*. Middle East Institute. Diakses via <https://www.mei.edu/publications/deradicalization-programs-and-counterterrorism-perspective-challenges-and-benefits>

²⁰ Soto, J. (2020, October 15). *Deradicalization programs: A counterterrorism tool*. American Security Project. Diakses dari <https://www.americansecurityproject.org/deradicalization-programs-a-counterterrorism-tool/>

²¹ Pradnyana, H. (2022). Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2(1), 11–26. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.11-26>

Indonesia" menyebutkan peran ini. Strategi penanganan terorisme di Indonesia, melibatkan kerjasama antara BNPT dan lembaga-lembaga lainnya, dengan fokus pada rehabilitasi narapidana teroris dan pendidikan masyarakat.²² Pendekatan yang dipersonalisasi dalam program deradikalisasi, menunjukkan bahwa re-edukasi agama, konseling psikologis, dan pendampingan adalah komponen kunci dalam mencapai efektivitas maksimal.

Dalam kacamata Prof. Yusny, kosmologi beragama memberikan kerangka kerja untuk memahami peran manusia sebagai khalifah di bumi. Program deradikalisasi harus fokus pada pendidikan agama yang benar untuk menghilangkan ideologi ekstrem. Prof. Yusny juga menegaskan bahwa terorisme bertentangan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin. Program deradikalisasi perlu menekankan ajaran Islam yang benar untuk mengoreksi pemahaman yang salah tentang jihad dan kekerasan.

Menurut Prof. Yusny, jihad adalah usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini dapat digunakan dalam program deradikalisasi untuk menunjukkan bahwa jihad tidak selalu berarti kekerasan, tetapi juga perjuangan untuk kebaikan. Konsep musyawarah dalam Islam, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Yusny, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi sudah ada dalam Islam. Ini dapat diintegrasikan dalam program deradikalisasi untuk menunjukkan pentingnya partisipasi komunitas dan pengambilan keputusan yang adil. Prof. Yusny menekankan pentingnya keadilan dalam pelayanan publik dan penegakan hukum untuk mencegah radikalisme. Pemberian struktur sosial dan ekonomi juga perlu untuk mengurangi ketidakpuasan yang dapat memicu ekstremisme. Pendekatan yang lebih manusiawi dan melibatkan tokoh idola, seperti yang disarankan oleh Prof. Yusny, penting untuk keberhasilan program deradikalisasi. Sertifikasi ulama juga diperlukan untuk memastikan bahwa ajaran agama disampaikan oleh mereka yang benar-benar paham dan mampu mengajarkan dengan benar.

D. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman Prof. Yusny tentang deradikalisasi dan de-ekstrimisasi mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan beragama dan sosial. Istilah radikalisme tidak hanya terbatas pada praktik kekerasan, tetapi juga mencakup ucapan dan tindakan yang dapat memicu konflik sosial. Prof. Yusny menggarisbawahi bahwa penting untuk membedakan antara tindakan radikal yang merusak dan yang membangun, dengan

²² Febriansyah, J. (2022). Portrait of deradicalization in Indonesia: Has Pancasila been considered effective? *Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security*, 1(2), 199-222. <https://doi.org/10.15294/ijctns.v1i2.59814>

menekankan bahwa tindakan radikal yang positif dapat membawa ketekunan dan disiplin dalam kehidupan. Kosmologi beragama menurut Prof. Yusny adalah konsep yang menekankan bahwa manusia diciptakan dalam citra Tuhan, sehingga kekuasaan dan tindakan manusia harus mencerminkan tanggung jawab ilahi. Dalam konteks Indonesia, Pancasila dilihat sebagai mikrokosmos yang mencerminkan prinsip keberagamaan yang harmonis dan inklusif.

Pertama, kosmologi beragama menjelaskan hubungan antara Tuhan dan manusia serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, dengan Pancasila sebagai mikrokosmos dari nilai-nilai keberagamaan di Indonesia. *Kedua*, terorisme bukanlah ajaran Islam, dan tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama adalah salah besar dan bertentangan dengan prinsip rahmatan lil'alam. *Ketiga*, jihad dalam pandangan Prof. Yusny mencakup berbagai bentuk perjuangan yang dilakukan dengan tulus, seperti menuntut ilmu dan menegakkan keadilan, bukan semata-mata perang fisik. *Keempat*, konsep musyawarah dalam Islam sejalan dengan prinsip demokrasi, dan meskipun demokrasi langsung memiliki kekurangan, penting untuk memilih pemimpin berdasarkan keahlian dan pemahaman. *Kelima*, penanganan terorisme di Indonesia harus fokus pada pemberian pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil untuk mencegah ketidakpuasan yang dapat memicu radikalisme dan ekstremisme. *Keenam*, pendekatan yang lebih manusiawi dan pembinaan yang melibatkan tokoh idola dari kalangan mereka yang terlibat dalam ekstremisme diperlukan, serta pentingnya sertifikasi ulama untuk memastikan ajaran agama disampaikan dengan benar oleh mereka yang memiliki kapabilitas dan pemahaman yang memadai.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa humanisme dalam pemikiran Prof. Yusny dapat menjadi dasar yang kuat dalam strategi deradikalisasi dan de-ekstremisasi. Melalui pendekatan yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, serta penegakan keadilan sosial, diharapkan pemahaman yang benar tentang Islam dapat tersebar luas, mengurangi potensi radikalisme dan ekstremisme, serta membangun masyarakat yang lebih damai dan adil. Berdasarkan implikasi dari temuan ini, peneliti merekomendasikan beberapa langkah ke depan. *Pertama*, peningkatan program sertifikasi ulama sangat penting untuk memastikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama. *Kedua*, perlu adanya pemberian sistem pelayanan publik dan penegakan hukum yang lebih adil untuk mencegah ketidakpuasan yang dapat memicu radikalisme. *Ketiga*, penerapan pendekatan deradikalisasi yang lebih manusiawi dan melibatkan tokoh-tokoh idola dari kalangan ekstremis diperlukan.

E. Daftar Rujukan

- Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, 7(2), 141–156. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.29>
- Amiruddin, M. H. (2014). Isu Terorisme dan Respons Aktivis Muda Aceh. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1), 25. <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.256>
- Bardi, A. (2023). Pengaturan Kualifikasi Terorisme Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain. *JATISWARA*, 38(1). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.484>
- BBC News Indonesia. (2023, April 18). Delapan orang terduga teroris dari kelompok Jemaah Islamiyah (JI) ditangkap oleh Detasemen Khusus 88 di Sulawesi Tengah. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgyd29j2j0o>
- Clutterbuck, L. (2015, June 10). Deradicalization programs and counterterrorism: A perspective on the challenges and benefits. Middle East Institute. <https://www.mei.edu/publications/deradicalization-programs-and-counterterrorism-perspective-challenges-and-benefits>
- DetikNews. (2023, April 18). BNPT: Terduga Teroris Karawang Sudah Dideradikalisasi tapi Belum Berubah. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7411593/bnpt-terduga-teroris-karawang-sudah-dideradikalisasi-tapi-belum-berubah>
- DetikNews. (2023, April 18). Terduga Teroris yang Ditangkap di Karawang Terafiliasi Pendukung ISIS. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7393018/terduga-teroris-yang-ditangkap-di-karawang-terafiliasi-pendukung-isis>
- DetikNews. <https://news.detik.com/berita/4024374/rentetan-teror-dari-surabaya-sampai-riau>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2024.
- Febriansyah, J. (2022). Portrait of deradicalization in Indonesia: Has Pancasila been considered effective? *Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security*, 1(2), 199-222. <https://doi.org/10.15294/ijctns.v1i2.59814>
- Fakhri, F., & Diana, R. (2022). Strategi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Membendung Terorisme di Kota Banda Aceh. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 4(1), 1–21. Retrieved from <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/alidarah/article/view/13128>
- Galib, S. A. (2021). Legitimasi Kekerasan: Titik Temu Radikalisme dan Terorisme. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 1–16. <https://doi.org/10.37252/an-nur.v13i1.100>

- Hikam, M. A. S. (2016). *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: Kompas.
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i2.561>
- Kamaruzzaman, B. A., et.al. (2016). *Yusny Saby Sang Motivator, Menelusuri Karakter Pemimpin Jujur dan Ikhlas dalam Membangun Umat*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad. *Memahami Potensi Radikalisme & Terorisme di Aceh*. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2016).
- Kusuma, A. J., Warsito, T., Surwandono, S., & Muhammad, A. (2019). Indonesia dan Ancaman Terorisme: Dalam Analisis Dimensi Imaterial. *Sosiohumaniora*, 21(3). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.21142>
- Marlina, R., dkk. (2021). Paham Radikal dalam Pandangan Tokoh Agama di Banda Aceh. *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2021, 190-207. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jpi>
- Price, M. (2017, May 26). Can terrorists be deradicalized? *Science Magazine*. Retrieved from <https://www.risetopeace.org/2018/02/25/can-deradicalization-reduce-violent-extremism-this-expert-thinks-so/jneulen/>
- Pradnyana, H. (2022). Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2(1), 11–26. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.11-26>
- Putra, B. A. (2017). Sejarah Terorisme di Indonesia. *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 2(2), 107. <https://doi.org/10.29300/tjksi.v2i2.719>
- Soto, J. (2020, October 15). Deradicalization programs: A counterterrorism tool. *American Security Project*. <https://www.americansecurityproject.org/deradicalization-programs-a-counterterrorism-tool/>
- Sukoco, A. (2021). Media, Globalisasi dan Ancaman Terorisme. *Journal of Terrorism Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.7454/jts.v3i2.1039>
- Ulfia, M., & Sugara, R. (2022). Tindakan Sosial Keterlibatan Perempuan dalam Jaringan dan Aksi Terorisme di Indonesia. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(1), 278–294. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1974>

Zulfikar, M., & Aminah, A. (2020). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 129–144. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>